SCRIPTA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA

Vol. 4 No. 2, Desember 2022, Hal. 169-181

<https://doi.org/10.33019/scripta.v4i2.138>

ISSN: 2656-9809 (Online)

<http://scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta/index>

**PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENERTIBAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG**

Ahmad Ilham Fachriza

Universita Negeri Semarang

Email: ahmadilhamfachriza@gmail.com*Indriana Firdaus*

Universitas Negeri Semarang

Email: indriputri5510@gmail.com*Abdul Fatah*

Universitas Bangka Belitung

Email: abdulfataharsa@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah Kota Semarang terkait pengaturan serta penertibaan pedagang kaki lima. Melihat semakin bertambah banyaknya jumlah PKL maka permasalahan yang lebih kompleks juga akan sering muncul, baik itu masalah tata ruang, kebersihan, kenyamanan, serta kemacetan. Namun jika dilihat dari sisi positif kehadiran PKL justru dapat membantu mendongkrak roda perekonomian. Maka dari itu perhatian lebih harus ditujukan terkhususnya kepada pelaku usaha tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode hukum normatif-empiris, yakni merupakan penelitian yang akan berfokus mengkaji dan mempertimbangkan ketentuan hukum serta mengkaitkannya dengan fakta yang muncul di lapangan. Berkenaan dengan itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan sumber literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang tentu berpedoman kepada Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2000 pasal 1, Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, namun kebijakan yang sudah direalisasikan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dan maksimal. Dan untuk menjalankan kebijakan tersebut perlu adanya evaluasi baik itu dari segi komunikasi, diskusi, serta kerja sama, untuk mempermudah dalam proses koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah dan pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Peran Pemerintah Daerah, Kebijakan

Abstract

This study aims to examine the role of local government in regulating, ordering, and empowering street vendors in the city of Semarang. Seeing the increasing number of street vendors, more complex problems will often arise, be it spatial planning, cleanliness, comfort, and traffic jams. However, if viewed from a positive side, the presence of street vendors can actually help boost the wheels of the economy. Therefore, more attention must be paid especially to these business actors. This study uses the normative-empirical legal research method, which is research that will examine and consider legal provisions and relate them to facts that appear in the field, while data collection techniques are carried out by observation, interviews, and other literature. From the research results, we can conclude that the Semarang City Government has made various efforts related to regulation, control, and empowerment of street vendors by referring to Semarang City Regional Regulation Number 11 of 2000 article 1, Concerning Regulation and Development of Street Vendors, but policies that have been realized has not fully run optimally and maximally. And to carry out this policy, it is necessary to evaluate both in terms of communication, discussion and cooperation, to facilitate the coordination process between local governments and street vendors. **Keywords:** Street Vendors, Role of Local Government, policy

I. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hak atas perumahan dan juga hak untuk mendapatkan upah serta makanan. Hak bagi setiap masyarakat/warga negara untuk mendapatkan pekerjaan telah dijamin dalam pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)(Kementerian Hukum dan HAM RI 1999) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh serta berkembang secara layak. Wajib serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan, penghormatan, serta melakukan penegakan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara dalam pasal 38 UU tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaan layak yang ia sukai sesuai dengan kemampuan, bakat dan kecakapannya. PKL dapat dikatakan sebagai imbas dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pekerjaan(Fitri S Kasim and Selviyana R Manan 2022). Perkembangan jumlah penduduk saat ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, agar tidak menimbulkan angka pengangguran yang cukup tinggi (Trisnawati, Sulandari, and Santoso 2013). Saat adanya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan relatif akan memunculkan masalah sosial diantaranya permasalahan kesehatan, ketimpangan pendidikan dan ekonomi.

Permasalahan ekonomi, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan kemudian akan berujung kepada melonjaknya angka kriminalitas yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat lainnya(Toni, Agus; Susilowati, Rini; Sartipa 2020). Kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu akibat dari ketidaktersediaanya lapangan pekerjaan. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki berbarengan dengan rendahnya kompetensi menyebabkan mereka memilih pekerjaan ini untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, karena jalan yang ditempuh untuk menjadi seorang Pedagang Kaki Lima relatif lebih mudah, tidak harus berpendidikan tinggi, dan tidak harus memiliki modal yang besar.

Kota Semarang menjadi salah satu daerah berkembangnya Pedagang Kaki Lima, karena Semarang merupakan salah satu Ibu Kota Provinsi yang menjadi pusatnya perdagangan dan aktivitas masyarakat. Bahkan jumlah PKL di Kota Semarang diperkirakan selalu bertambah setiap tahunnya(Imanda and Rusdari 2020). Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 11 Tahun 2000 Pasal 1, Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), mendefinisikan bahwa, "Pedagang Kaki Lima" merupakan pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah

dan atau Pihak lain (*Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2000*).

Kehadiran PKL memang membantu untuk mendongkrak perputaran roda perekonomian, namun jika tidak diatur dan ditertibkan, keberadaan mereka justru akan menyebabkan permasalahan lain, baik itu pembangunan, ketertiban umum, bahkan kondisi tata ruang. Hingga kehadiran mereka menyebabkan dilema dari dua sisi, yaitu antara kepentingan hidup masyarakat dan juga kepentingan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Herwansyah, ‘Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus: Kawasan Pasar Pagi Kotabumi, Lampung Utara)’, *Jurnal Petitum*, 1 (2021)..

Permasalahan mengenai PKL memang tak kunjung selesai, selain keberadaannya kerap dianggap ilegal, merekapun sering disebut sebagai ancaman keindahan tata kota. Karena keberadaannya menepati ruang publik, seperti di trotoar, taman kota, terminal, perempatan jalan, tempat parkir, bahkan berkeliling ke rumah-rumah penduduk, yang terkadang hal tersebut mengganggu aspek kebersihan dan kerapihan wajah tatanan Kota(Hidayati and Wahyono 2013).

Implikasi yang terjadi atas fenomena PKL ini adalah terhambatnya arus lalu lintas, dimana kadang PKL mengambil ruas jalan yang sempit demi alasan mencari pelanggan. Hal lain terkait higienitas adalah sampah yang dihasilkan serta bau yang tidak sedap, kerap kali menjadi masalah tidak hanya di Kota Semarang, tetapi di banyak kota di Indonesia(Rahman, Madani, and Usman 2021).

Akibat fenomena ini, Pemerintah Perlu bertindak tegas dan nyata, agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi dan mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengaturan, penataan, penertiban, dan relokasi juga harus tetap terus dijalankan, agar tidak mengganggu aktivitas lainnya (Adinugroho, Purnaweni, and ... 2016). Namun kebijakan yang diterbitkan harusnya lebih menyesuaikan kondisi mereka dan tidak mengurangi hak mereka sebagai warga negara, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru membebani dan dirasa tidak adil oleh PKL. Berangkat dari latar belakang tersebut, permasalahan PKL di Kota Semarang mejadi fokus penulis untuk dijadikan bahan dalam penelitian, karena dirasa menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam terkait topik pembahasan tersebut, agar dapat berkontribusi dalam menyumbangkan pola pemikiran dan solusi kepada para pembaca terkait tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari keresahan yang kian mengkhawatirkan, oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian yang akan mengkaji dan mempertimbangkan ketentuan hukum (perundang-undangan) serta mengkaitkannya dengan fakta apa yang muncul di lapangan (Efendi and Ibrahim 2018).

Bahan hukum, akan dikumpulkan dari berbagai sumber baik itu hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Kota Semarang, masyarakat Kota Semarang, observasi, serta literatur lainnya seperti buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dan kemudian akan di sajikan secara deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana hukum yang ada dikaitkan dengan penerapannya ditengah masyarakat.

Didasari dengan tinjauan hukum terkini dan permasalahan yang merebak di kota-kota besar, artikel ini bisa dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan, peneliti meyakini setelah proses kritik sumber dan verifikasi data, penelitian ini lebih menonjolkan kepada kajian mengapa dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi permasalahan dengan studi kasus Kota Semarang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kota Semarang dalam Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah salah satu upaya yang dilakukan agar terciptanya tatanan kota yang bersih, rapi, indah, dan nyaman. Karena Sebagian kecil dampak negatif dari keberadaan PKL ini yaitu, terciptanya kawasan yang kumuh, rusaknya fasilitas umum, kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya (Fitri S Kasim and Selviyana R Manan 2022). Pedagang kaki lima atau bisa disebut dengan penjual liar adalah seorang pedagang yang menjual barang dagangannya di atas trotoar, pinggir jalan raya, halaman pasar, terminal bus, emperan toko, ataupun tempat lainnya yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Di daerah Semarang sendiri keberadaan Pedagang Kaki Lima yang dianggap illegal, dapat dilihat di ruas

jalan RS. Karyadi, depan Masjid Baiturrahman Semarang, Jln. Prof Hamka, Ngaliyan, Lawang Sewu, Jln. Simongan Raya, Bantaran Kali Es.

Pertentangan kedua belah pihak antara Pemerintah dan PKL memang acap kali terjadi, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing pihak. Jika dilihat secara nyata, tujuan mereka berdagang hanyalah untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pemanfaatan tempat yang tidak semestinya, yang kadang memicu konflik sosial. Berbagai kebijakan dan strategi sudah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatur serta menertibkan Pedagang Kaki Lima, yang tentunya masih berkilat kepada Peraturan Daerah Kota Semarang No 11 Tahun 2000. Adapun Peran dan strategi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengaturan serta penertiban PKL, yaitu:

1. Relokasi Lahan

Lokasi PKL yang di anggap mengganggu aktifitas publik sebelumnya, dengan Pemkot Semarang dilakukan relokasi atau pemindahan ke tempat lain yang di anggap lebih baik dan layak, seperti di Pasar Dargo, Pasar Penggaron, Jl. Kedungjati, Pasar Waru (yandip 2022). Kebijakan relokasi lahan ini bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan dan keseimbangan. Namun jika diliat dari upaya dan tindakan nyata pemerintah, cara-cara yang dilakukan Pemerintah tidak atau belum bisa mengkoordinir para pelaku usaha, sehingga kerap sekali menimbulkan perlawanan dan juga konflik antar PKL, Satpol PP dan juga masyarakat umum.

Pemerintah Kota Semarang bahkan berjanji untuk memberikan subsidi berupa listrik bagi para pedagang ataupun barang dan tempat yang nyaman bagi para pedagang. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, terlihat dari banyaknya PKL yang masih menolak untuk dipindahkan dan tetap berjualan di kawasan yang dilarang tersebut. Seperti halnya yang sudah pernah terjadi di depan RS Kariadi pedagang dipindahkan karena tidak membayar retribusi dan mendirikan bangunan diatas saluran air¹. Pedagang di Jalan Kariadi melanggar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018, tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Melakukan pembinaan dan Pemberian bantuan

Dalam rangka menciptakan suatu keteraturan, pemberdayaan serta pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kota Semarang harus sering dimasifkan.

¹ Budi Susanto, "Pemkot Semarang Akan Reloksi puluhan Pedagang Yang Menempati Jalan Dr Kariadi", <https://jateng.tribunnews.com/2022/10/13/pemkot-semarang-akan-relokasi-puluhan-pedagang-yang-menempati-jalan-dr-kariadi>.

Pemberdayaan adalah salah satu bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam bersinergi mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi para pelaku usaha, hingga bisa melahirkan kualitas dan kuantitas yang baik. Selaras dengan hal tersebut upaya pembinaan harus juga di laksanakan, salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu, pendataan, penyuluhan, serta pemimbingan, agar harmonisasi dapat terjalin sehingga tujuan dan harapan semua pihak dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah Kota Semarang melakukan Koordinasi antar beberapa pihak dengan melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Perdagangan Kota Semarang, UMKM dan perindustrian Kota Semarang, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Semarang. Diskusi publik antar pemegang hak sering dijalankan namun pembinaan secara terkhusus dan berkelanjutan belum diupayakan. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan, sehingga kebijakan yang sudah di implementasikan dapat bejalan dengan optimal.

Berdasarkan bunyi pasal 34 UUD 1945 ayat 2, menyatakan bahwa jaminan sosial dan pemberdayaan seluruh masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan harus dikembangkan oleh negara. Selaras dengan hal tersebut, dalam upaya proses pemberdayaan para pedagang kaki lima di Kota Semarang, pemerintah terkait juga memberikan bantuan khusus kepada pelaku usaha, seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT), pemberian minyak goreng, bantuan fasilitas yang memadai (*gerobak, selter knock down, tenda,*) dan bantuan lainnya. Tujuan dari hal ini tidak lain dan tidak bukan yaitu meringkankan selaku pemilik usaha

3. Pemanfaatan aplikasi SIP'S

Dalam upaya mendukung UMKM pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Semarang juga memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk membuat suatu aplikasi yang bernama Sistem Informasi Perdagangan Kota Semarang atau disingkat SIP'S. Aplikasi tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai perdagangan di wilayah pasar dan PKL, informasi lainnya menyangkut harga kebutuhan pokok di pasar tradisional serta informasi ekspor dan impor barang (Adiastuti 2022).

Dalam Perda Kota Semarang No 11 tahun 2000, Tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima tertera tujuan atas kebijakan tersebut, yaitu:

1. Melalui surat perizinan, perekonomian PKL dapat terjamin.
2. Terciptanya lingkungan yang bersih, tertib dan aman dengan ditatnya sektor informal.

3. Terjaminnya PAD dalam sektor informal (*Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2000*).

Namun harus kita ketahui bahwasanya, setiap kebijakan dan upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, pasti memiliki dampak secara tidak langsung, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Upaya Pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima di kota Semarang seperti, melakukan sosialisasi atau pengarahan, penyediaan lahan, pemberian bantuan belum secara nyata memberikan dampak efisiensi dan angin segar untuk para pedagang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat umum di Kota Semarang, penulis menyimpulkan ada beberapa dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemkot Semarang, adapun dampak positif dalam hal ini :

1. Tertatanya wajah Kota Semarang yang lebih rapi. Ketidakrapihan yang disebabkan oleh limbah dari para PKL, dan bangunan semipermanen yang mengganggu jalan, mengakibatkan wajah Kota Semarang terlihat kotor dan tidak nyaman, namun setelah di relokasi ke tempat yang lebih baik, setidaknya hal tersebut dapat terminimalisir.
2. Berkurangnya kemacetan, karena Sebagian pedagang dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Dalam hal ini ke tempat yang pantas dan tidak di ruas jalan yang sempit serta tidak mengganggu pejalan kaki hingga kendaraan bermotor yang lewat
3. Bantuan yang diberikan oleh Pemkot Semarang dirasa sangat membantu, karena digunakan untuk modal usaha dagangnya, karena pelanggan yang tidak menentu, dan omset yang kadang menurun, pemerintah dirasa sudah melakukan hal yang tepat.
4. Meskipun pemanfaatan aplikasi SIP'S belum maksimal, namun nyatanya dapat mempermudah para pelaku usaha dan konsumen dalam berinteraksi. Proses digitalisasi yang dilakukan sudah patut diacungi jempol karena ini sangat membantu para pelaku ekonomi.

Berbagai upaya tentu telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakn terhadap Pedagang Kaki Lima di depan RS Kariadi Kota Semarang, beliau mengungkapkan ada beberapa dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut.

Pertama, sosialisasi/ intruksi yang diberikan oleh pemerintah kelurahan, terkadang berbeda dengan apa yang diintruksikan oleh Satpol PP terkait, sehingga sering terjadi missskomunikasi, yang menyebabkan pelaku usaha sering marah dan tidak terima jika di tegur. Kesalahpahaman seperti ini harus ditindak karena mereka juga berhak atas hak mereka.

Kedua, pembuatan surat perizinan untuk berjualan sangat sulit/ribet, sehingga banyak dari mereka yang berpikir untuk tidak mau mengurus dan akhirnya masuk dalam kategori PKL ilegal. Sulitnya mengurus ijin sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, entah karena apa seringkali masyarakat khususnya PKL merasa termarginalkan.

Ketiga, masih banyak dari PKL yang menolak untuk direlokasi, dengan alasan perpindahan hanya akan menghambat aktivitas PKL, seperti jauh dari rumah, takut omset yang didapatkan menurun karena dianggap sepi pengunjung, dan juga takut tidak mampu membayar sewa kios lahan tersebut, sehingga banyak juga dari mereka yang tetap berjualan di lokasi yang lama, akibatnya tujuan dari upaya tersebut tidak tercapai, bahkan ada suatu kondisi dimana aktivitas PKL tersebut mengakibatkan banjir, dan saluran air menjadi terhambat karena sampah yang bertumpuk.

Keempat, pemberian bantuan yang diberikan pemerintah daerah tidak merata. Sehingga terkadang timbul kecemburuan sosial yang berakhir terhadap konflik antar pedagang.

Kelima, tidak semua Pedagang Memiliki Handpone yang canggih dan tidak semua pedagang bisa mengoperasikan telepon genggam, sehingga pemanfaatan aplikasi SIP'S sepertinya dianggap kurang maksimal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemkot Semarang belum sepenuhnya optimal, efisien, dan efektif karena dianggap belum mampu untuk menjembatani dan mengakomodasi kebutuhan PKL tersebut. Pemerintah dianggap hanya memberikan lahan saja, tanpa memikirkan bagaimana cara PKL untuk menjangkau area tersebut. Dilanjut dengan proses digitalisasi yang terhalang oleh *gagap teknologi* sebaiknya pemerintah Kota Semarang memaksimalkan pada komunikasi langsung serta pemberdayaan komunikasi melalui handphone.

Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan.

Upaya untuk mewujudkan PKL yang tertib dan juga teratur ini bukan sebuah hal yang mudah untuk dijalankan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh PKL di wilayah dagangannya diantaranya meliputi, PKL yang meletakkan barang dagangannya di pinggir jalan atau trotoar, PKL yang bangunannya permanen seperti yang terjadi di sepanjang pinggir badan sungai Banjir Kanal Timur, tidak patuhnya PKL dalam membayar biaya retribusi. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 pasal 7 ayat b, pasal 8 poin b, serta pasal 5. Tentunya

kita dapat mengkaji faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, terkait faktor, penulis membagi menjadi faktor penghambat dan pendukung,

1. Faktor Penghambat

- Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM yang kurang memadai serta paham dengan kondisi adalah hal yang disesalkan dari fenomena ini, kurangnya sumberdaya dari pemerintah dianggap belum memenuhi atas dasar kebutuhan yang terdapat di lapangan dalam rangka memberlakukan pengaturan dan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima.

- Komunikasi

Seperti halnya komunikasi antara kegiatan sosialisasi dengan satpol PP yang bertindak di lapangan dianggap kurang komunikasi, menyebabkan massa yang merasa tidak adil karena tidak sesuai briefing di awal. Komunikasi antara paguyuban PKL serta pemerintah yang perlu diperbaiki kedepannya. *Breakdown* kebijakan dari pemerintah kepada kelurahan/kecamatan terkait karena kadang dirasa kurang faham dalam mendalami hal yang harus dilakukan dari sebuah kebijakan.

- Disposisi

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 dan SK Walikota Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang penetapan lahan/ lokasi PKL di wilayah Kota Semarang. Selain itu, Dinas Pasar melalui bidang PKL berkomitmen untuk melakukan penataan shelter bagi PKL. Sejauh ini, tindakan yang dilakukan dalam pemberian sanksi hanya berupa teguran tertulis maupun secara langsung. Belum terlihat tindakan langsung secara tegas sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2000.

- Struktur Birokrasi

Tidak adanya SOP (standar operasional prosedur) dari dinas terkait serta satpol PP kadang terjadi miskomunikasi terhadap proses pembinaan PKL di Kota Semarang. Miskomunikasi terjadi diantara aparat pelaksana, hal ini terjadi karena dari dinas terkait turun ke kecamatan, lalu turun lagi ke kelurahan, sampai akhirnya ke PKL. Hal ini sangat sering terjadi salah pengertian karena banyaknya hierarki yang harus dilalui.

- Perda Yang Kurang Efektif

Sudah menjadi stereotype masyarakat bahwa PKL sering melakukan pelanggaran, tentunya dalam kasus ini mereka yang melanggar Perda No 11 Tahun 2000. Tujuan Perda No 11 tahun 2000 dalam rangka mewujudkan PKL yang tertib dan teratur di Kota Semarang belum berjalan

dengan baik. Karena masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, diantaranya PKL yang masih meletakkan barang dagangan mereka di emperan jalan atau trotoar, keberadaan PKL yang bangunannya permanen di sepanjang badan sungai, ketidakpatuhan PKL dalam membayar retribusi.

Diperlukan tindakan tegas dari Dinas terkait terhadap PKL yang melanggar Perda No 11 Tahun 2000. Menerapkan sanksi yang memang berlaku dan diatur dalam Perda No 11 tahun 2000. Misalnya melalui pencabutan surat ijin usaha, pembongkaran tempat usaha PKL dan penyitaan barang

2. Faktor Pendukung

- Sumber Daya Muda

Manifestasi dari perkembangan itu sendiri bersifat cepat dan dinamis, yang dimaksud sumber daya muda disini adalah tenaga kerja dinas pengelola terkait pedagang kaki lima (PKL) berusia muda dan beringin tahu lebih. Generasi muda tentunya lebih bisa memberi saran dengan pertimbangan pimpinan dinas terkait pembinaan dan pelaksanaan relokasi serta kegiatan yang berhubungan tentang pengaturan dan penertiban PKL di Kota Semarang.

- Sistem Administrasi Progresif

Kekuasaan manusia di dunia ini harus didasarkan pada hukum agar sah (Mertokusumo, 2014: 77), termasuk kekuasaan manusia untuk melakukan kegiatan pengaturan yang dilakukan pihak berwenang. Dimana para pelaku yang masuk dan mengelola system informasi bersifat progresif dan dinamis kepada perubahan, dan titik sambung dengan perda terkait adalah pembinaan dan pengaturan PKL dilakukan dengan dasar moral dan menyesuaikan pada zaman yang begitu dinamis.

Solusi dalam mengatasi ketidakefektifan Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Semarang

Diputuskannya untuk dibuat suatu peraturan daerah pasti ada penyebabnya, dalam Perda No 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima PKL di Kota Semarang berfungsi untuk mengatur (*regeling*). Setiap aturan akan ada standar keefektifan yang berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Efektivitas memiliki arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban². Misalnya dulu PKL bisa berjualan di ruas jalan sempit karena belum banyaknya kendaraan bermotor yang ada jalan, tetapi seiring dengan perkembangan

² Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 67

zaman itu tidak bisa dilakukan karena akan berakibat lalu lintas yang tersendat. Lanjut pada solusi dalam mengatasi ketidakefektifan pengaturan dan penertiban PKL di Kota Semarang. Data yang penulis input dari pedagang di beberapa titik di Kota Semarang dan wawancara kepada pimpinan Dinas Perdagangan terkait dalam hal ini juga Satpol PP.

Penulis mendapat beberapa solusi yang berupa keluhan kesah dari pedagang yang telah diwawancarai yang kemudian disesuaikan dengan rencana instansi terkait kedepannya. Rata-rata pedagang mengeluhkan dengan cara koersif dan kurangnya koordinasi dari Dinas Perdagangan dengan yang bertindak di lapangan, maka solusi dari hal yang demikian adalah dibuatnya rapat koordinasi agar lebih tersiapkannya pembinaan dan pengaturan PKL di Kota Semarang. Yang kedua adalah kurangnya aparat yang bergerak ini bisa menghambat peningkatan kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No 11 Tahun 2000 tersebut, solusi dari kami adalah membuka gerbang sukarelawan agar dapat mewujudkan tujuan bersama dengan bantuan dari luar instansi. Ketiga yang dikeluhkan dari PKL dan sudah mulai dibenahi oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah komunikasi dalam hal ini adalah aspirasi dari PKL, masukan serta saran dan kritik. Yang terakhir adalah PKL sangat mengeluhkan dengan sistim birokrasi yang ribet, solusinya adalah diberlakukanya sistim birokrasi satu pintu supaya tidak terjadi disinformasi atau miskomunikasi. Seandainya pembuatan perijinan cukup di kelurahan, maka tidak perlu banyak hierarki yang menangani.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian pembahasan di atas, serta mempertimbangkan pada keefektifan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang PKL, permasalahan pada penertiban, pengaturan, serta pemberdayaan PKL di Kota Semarang terdapat pada ketidaksinkronan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dan petugas terkait penegakan ketertiban di lapangan. Upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang salah satunya pemberdayaan melalui pemberian bantuan, pembuatan aplikasi SIP'S sampai dengan relokasi lahan, namun dari data yang Nampak dilapangan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal, mengingat beberapa pertimbangan. Meskipun banyak dilema akan pelaksanaannya seperti masyarakat yang kurang memiliki sumber daya akan teknologi serta struktur birokrasi yang cenderung menyulitkan masyarakat dalam menerbitkan izin usaha. Dapat kita pahami dan menarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penertiban dan pengaturan PKL belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya keoptimalan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti sumber daya, struktur birokrasi dan komunikasi antar organ pemerintah yang berkaitan dalam upaya penertiban dan pengaturan PKL. Merubah beberapa penyebab ketidakefektifan pengaturan dan memaksimalkan sumber daya dengan koordinasi yang baik adalah solusi dari permasalahan pengaturan PKL di Kota Semarang.

Saran

Anjuran dari penulis untuk peneliti berikutnya selain artikel ini dapat dijadikan referensi juga penulis berharap untuk kedepannya lebih diforward ke dinas terkait karena kami berharap dari penelitian yang kami lakukan adalah evaluasi perda demi kepentingan khalayak serta untuk administrasi yang transparan dengan sistem satu pintu.

DAFTARPUSTAKA

- Adinugroho, Y K, H Purnaweni, and ... 2016. "Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tlogosari Semarang." *Journal of Public Policy ...*, no. 11: 1–10.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/14248>.
- Efendi, Joenadi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Groub.
- Fitri S Kasim, and Selviyana R Manan. 2022. "Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli." *Jurnal Multidisiplin Madani 2* (5): 2213–28. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>.
- Herwansyah. 2021. "KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Kasus: Kawasan Pasar Pagi Kotabumi, Lampung Utara)." *Jurnal Petitum 1*.
- Hidayati, Nuraini Nurul, and Hadi Wahyono. 2013. "Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Kertini Semarang." *Jurnal Teknik PWK 2* (3): 314–27.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2852>.
- Imanda, bisma Mochamad, and Rusdari. 2020. "Kebijakan Dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang." *Indonesian Journal of Development Economics 3* (1): 616–24.
- Rahman, Abd., Muhlis Madani, and Jaelan Usman. 2021. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar." *JPPM: Journal of Public Policy and Management 3* (1): 07–16. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901>.
- Toni, Agus; Susilowati, Rini; Sartipa, Dewi. 2020. "Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi." *Jurnal Griya Cendikia 6* (2): 130–54.
- Trisnawati, Eka Yuli, Susi Sulandari, and R Slamet Santoso. 2013. "Kebijakan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000)." *Journal of Public Policy and Management Review 2* (2): 200–210.
- Yulianto, dwi galih, and Sundarsomo. 2000. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang) Oleh : Galih Dwi Yulianto , Dr." *Universitas Diponegoro*, 12.